PEGADAIAN SYARI'AH: (Teori dan Prakteknya di Indonesia)

Eli Suryani

Abstract: One of alternative ways in Islamic financing is by using pawnshop, it is did not need for any difficult requirement even with the process. That is why an institution of Islamic pawnshop has social functions (besides it indicates of business function) towards society benefits as ta'awun (helpful) concept in Islam. But we still need for a review study related with the all transactions and practicalities in the Islamic pawnshop. Practically and operationally, an Islamic pawnshop is more taking part in economic aspect and profits oriented. Only a few of them would be orient in social aspect. The most basic ideology of a pawnshop (rahn) is for tabarru' (goodness) and not for tijarah (trade).

Key words: Islamic Pawnshop

PENDAHULUAN

Satu di antara sekian banyak bentuk transaksi muamalah yang diintrodusir oleh Islam untuk mencapai dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat adalah transaksi gadai (*rahn/mortgage*). Dalam wacana fiqh klasik akad *rahn* hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan dana, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Prinsip dan motivasi dasar dan akad *rahn* lebih cenderung bersifat sebagai sebuah *philanthropy* Islam yang berorientasi untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi evolusi dan pergeseran orientasi dan makna filosofis dasar *rahn* itu sendiri. Artinya, ada kesan akad ini kemudian lebih berkonsentrasi pada transaksi-transaksi yang bersifat *profits oriented* dan mengenyampingkan aspek filantropis dan sosial yang merupakan spirit dasar dan transaksi *rahn* tersebut.

Untuk konteks ke-Indonesia-an lembaga pegadaian syariah hadir untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan untuk menyahtui kegelisahan-kegelisahan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang mendambakan kehadiran sebuah lembaga pegadaian syariah yang terbebas dari unsur riba dan bunga. Namun demikian, dalam prakteknya setelah kelahiran lembaga pegadaian syariah tersebut keberadaan lembaga keuangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat citra yang menempel sangat identik dengan sebuah lembaga keuangan “orang-orang susah”. Yang tidak jauh berbeda dengan lembaga pegadaian konvensional, dan terbangunnya opini publik bahwa lembaga pegadaian syariah telah bergeser dan filosofis dasarnya yang menganut paradigma *ta'awun* (tolong menolong) menjadi lembaga yang bersifat *business oriented*, di samping masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang eksistensi dan pegadaian syariah tersebut. Realitas dan kecurigaan-kecurigaan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pegadaian syariah.

Idealnya, sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai syariah dan sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil, tentunya pegadaian syariah harus berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harus akomodatif terhadap berbagai persoalan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat, karena praktek gadaian syariah ini sangat strategis mengingat citra pegadaian memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. Akan tetapi perlu mengkaji ulang kembali sejauh mana pegadaian syariah yang ada saat ini mempromosikan nilai-nilai syariah dalam setiap produk yang ditawarkan, baik dan segi akad, prosedural, jaminan maupun ketentuan lain.

Makalah ini akan mencoba mengkaji secara deskriptif analitis dan kritis apakah praktek pegadaian syariah yang eksis saat ini telah mempromosikan dan melaksanakan misi filosofisnya sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan dana baik untuk konsumtif atau produktif, atau pegadaian syariah tidak lain hanya merupakan sebuah lembaga pseudo syari'ah yang hadir di tengah-tengah gegap gempita dan maraknya euforia untuk menerapkan sistem perekonomian berdasarkan nilai-nilai syariah.

Kajian ini diperlukan supaya tidak terjadi sikap *emosional* dan *misinterpretasi* dalam memahami lembaga pegadaian syariah yang eksis saat ini, dengan mengatakan bahwa pegadaian syariah telah *pure* menerapkan nilai-nilai syariah

normatif yang seharusnya, tanpa mengkonsultasikannya kembali dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariah dan fiqh Islam.

PENGERertian GADAI (RAHN)

Terma gadai dalam kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan: “pinjam meminjam dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak ditebus) maka barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman”.¹ Secara etimologi kata, *rahn* berasal dari kata *rahana-yarhanu* yang berarti *al-habs*, (menahan), *al-tsubut* (tetap), *al-dawam* (kekal), dan jaminan, yaitu: “memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman”,² atau menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris, terma *rahn* diterjemahkan menjadi “*pawning*, *mortgage*, dan *pledge*”,³ yang berarti “*to detain or prison*” *Rahn* dapat diartikan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam istilah hukum positif Indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runtuhan.

Dalam KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150, gadai didefinisikan sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang (utang piutang); memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dan barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-krediturnya.

Sedangkan dalam terminologi fiqh klasik ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama tentang *rahn*. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* dengan, “*harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*”. Menurut mereka, yang dijadikan agunan tersebut bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan agunan tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan adalah sertifikatnya.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan, “*Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap haka (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya*”. Sedangkan ulama mazhab Syafi’i dan Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, “*Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila yang berhutang tidak bisa membayar utangnya*”.⁴

Secara sederhana Sayid Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai,⁵ atau akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan baik secara keseluruhan maupun sebagian dan harta tersebut. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁶

Rahn merupakan salah satu jenis transaksi *tabarru'*⁷ karena apa yang diberikan *Rahin* (pemilik barang) untuk *murtahin* (pemegang barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (*uqud*) *'ainiyah*, di mana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima *'ain al-ma'qud*. Akad (transaksi) jenis ini ada lima, yaitu: *hibah, i'arah, ida', qard*, dan *rahn*.⁸ Akan tetapi menjadi haram hukumnya bagi orang yang memegang jaminan tersebut menikmati keuntungan dari jaminan yang dipegangnya itu dengan cara apapun, karena hak dan pemegang jaminan itu adalah memiliki, bukan menggunakannya.⁹ Artinya, ia tidak berkuasa untuk meminjamkan atau menyewakannya, atau memperbolehkan orang lain untuk mempergunakannya, karena pemegang jaminan itu tidak boleh mengeluarkan barang jaminan tersebut karena haknya hanya sebagai pemilik jaminan. Barang jaminan baru bisa dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, yaitu ketika utang tidak bisa dilunasi debitur. Oleh karena itu, hak kreditur hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Secara praktis dasar legalisasi *rahn* adalah sebagai solusi terhadap sebagian orang-orang yang kekurangan dana (*defisit unit*) dalam memenuhi kebutuhan hidup, sementara ada pihak-pihak yang mempunyai surplus dana, sedangkan secara *by nature* ada kecenderungan dari pihak yang memiliki surplus dana berkeberatan dan tidak mau meminjamkan uang tanpa ada jaminan (*without receiving the pledge*), karenanya Allah memahami kondisi tersebut untuk kemudian menjustifikasi praktek *rahn* sebagai solusi alterative terhadap kesulitan (*masyaqqah*) seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Menurut hukum perdata, antara gadai dan *rahn* dalam hukum Islam ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain:

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat dan barang yang digadaikan

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang

Sedangkan perbedaan gadai dengan *rahn* antara lain:

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Dalam *rahn* menurut hukum Islam tidak ada istilah "bunga uang".¹⁰

LANDASAN KONSEP

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah:

A1-Baqarah: 283

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Robb-Nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. 2: 283)

Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa di masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasul ditanya bolehkah kambingnya diperah. Nabi mengizinkan, sekadar untuk menutupi biaya pemeliharaannya. Artinya, Nabi mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dan barang yang digadaikan sekadar untuk menutupi biaya pemeliharaan.¹¹ Ketentuan ini tentunya sepanjang memenuhi rukun-rukun¹² dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat.

Hadits

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما
من يودی الى أجل ورهنه درعا من حدید رواه البخاری
ومسلم

“Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah SAW membeli makanan dan seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi“. (HR. Bukhari dan Muslim)

“Dan Abu Hurairah RA. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dan pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya“. (HR Asy-Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah)

“Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan“. (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An-Nasai)

“Dari Abi Hurainah RA. Rasulullah SAW bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadaz), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menenima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya“. (HR Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari)

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *manhun* (barang) sampai semua utang *radhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi
 - 3) Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Ketentuan penutup

- a. Jika salah satu tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- b. Fatwa mi berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹³

OPERASIONALISASI PEGADAIAN SYARIAH

Secara teoritis praktek gadai (*rahn*) yang terdapat pada pegadaian syariah dewasa ini adalah inovasi baru terhadap terma *rahn* yang terdapat dalam wacana fiqh klasik. Ketentuan dan wacana-wacana yang terdapat dalam fiqh klasik tersebut yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan perekonomian modern dengan melakukan kreasi baru, dan mensinergikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Bila dilihat dalam fiqh klasik, maka skema dan praktek *rahn* adalah skema yang sangat standar sekali, yaitu antara dua orang personal yang memiliki *surplus unit* dan di lain pihak yang dihadapkan pada kondisi *deficit unit*. Dalam kasus mi transaksi lebih cenderung bersifat transaksi *tabarru'* saja tanpa ada

unsur profits. Praktek *rahn* belum berlangsung dan dijumpai oleh sebuah lembaga keuangan dengan mekanisme dan skema modern seperti yang kita saksikan saat ini.

Saat ini, implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian konvensional. Dimana pegadaian dikelola oleh sebuah lembaga keuangan syariah, bukan lagi antara dua orang personal saja. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat. Juga, dalam praktek dan operasionalisasinya berbeda dari lembaga keuangan syariah lainnya seperti praktek pegadaian yang terdapat di Bank Syariah dan asuransi syariah.

Teknik transaksi

Menurut jenis barang yang digadaikan, prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dan sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hash praktek *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, kesulitan dalam menaksirkan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya.

Sedangkan menurut penaksiran barang, besarnya pinjaman dan pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dan besarnya nilai barang yang akan digadaikan.¹⁴ Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang dapat merugikan nasabah atau pihak pegadaian itu sendiri.¹⁵

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- a. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. *Akad ijarah* (akad sewa tempat) Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dalam gadai syariah *ijarah*, pihak pegadaian (*murtabin*) lebih cenderung mirip jasa tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan. Pihak pegadaian hanya mengambil *ujrah* (upah/sewa) terhadap jasa penitipan dan perawatan barang. Fenomena ini dapat terlihat ketika menjelang Lebaran Idul Fitri dengan banyaknya masyarakat yang mudik menitipkan mobil atau barang berharga lainnya kepada perum pegadaian dengan membayar sewa perawatan dan pemeliharaan.

Pada *rahn*, nasabah tidak dikenai bunga. Yang dipungut dan nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta administrasi.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, atau untuk yang sifatnya produktif seperti untuk tambahan modal kerja.

Disamping akad *rahn* dan *ijarah* dalam prakteknya pegadaian syariah menerapkan beberapa bentuk akad¹⁶ perjanjian, yaitu:

a. Akad *qardh al-hasan*

Dalam terminologi fiqh akad *qardh al-hasan* merupakan akad pinjaman kebajikan dan pinjaman tanpa laba (*zero return*) dimana al-Qur'an mendorong kaum muslimin agar mengadakannya untuk kalangan yang membutuhkan. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja, tetapi boleh memberikan kelebihan (*marjin*) menurut kebijaksanaannya.¹⁷ Sedangkan dalam pegadaian syariah akad ini biasa dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Dalam akad ini, pihak pegadaian tidak boleh mengambil keuntungan dan pihak *rahn* kecuali memungut biaya perawatan dan pemeliharaan barang yang digadaikan selama barang tersebut berada di pihak pegadaian. Biaya yang dipungut tersebut harus dinyatakan dalam

nominal dan jelas berapa jumlahnya. Akad ini lebih cenderung mengandung dimensi sosial (*ta'awun*) dan pihak pegadaian kepada *rahin*. Barang yang digadaikan biasanya adalah barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, seperti emas, barang elektronik dll.

b. Akad *mudharabah*

Secara konseptual perseroan *mudharabah* ini disebut juga *qiradh*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,¹⁸ sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola.¹⁹

Skema *mudharabah* merupakan jenis kemitraan dalam muamalah Islam yang menggabungkan pengalaman keuangan dengan pengalaman bisnis. Dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya dan pihak lain mengelola dengan pengalaman dan pengetahuan. Selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui sebelumnya pada perjanjian awal. Sedangkan dalam kerugian pihak pertama memikul semua resiko keuangan dan nasabah hanya kehilangan nilai kerjanya, bila hal ini merupakan keadaan di luar kemampuan nasabah.

Dalam praktek pegadaian, *mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. (Pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, penggadai (*rôhin*) akan memberikan margin keuntungan kepada pihak pegadaian selaku *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjam dilunasi.²⁰

c. Akad *ba'i muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rôhin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif dan usaha. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, maka *rahin* menyerahkan jaminan berupa barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan pesanan *rahin*, dan *rahin* akan memberikan *mark up* (margin keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung.²¹

Pendanaan

Sebagaimana lembaga keuangan yang lainnya, pegadaian syariah juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dan sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dan modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai foundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerja.

Perbedaan yang cukup mendasar dan teknik transaksi pegadaian syariah dibandingkan dengan pegadaian konvensional.

- a. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman dan bersifat bunga, dimana bunga tersebut bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan pada pegadaian syariah, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dan nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Dan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.
- b. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian: hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dan aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *assessor*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah Dan Konvensional

Persamaan	Perbedaan
<ul style="list-style-type: none"> a. Hak gadai atas pinjaman berupa uang b. Adanya agunan sebagai jaminan utang c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai e. Apabila batas pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Rahn</i> dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, <i>rahn</i> berlaku pada seluruh benda, baik hams yang bergerak maupun yang tidak bergerak c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, <i>rahn</i> menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga

LELANG BARANG GADAI

Secara juridis, pegadaian adalah salah satu bentuk akad²² (perikatan hukum) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban melunasi hutangnya pada pihak *murtahin* (lembaga pegadaian) sedangkan lembaga pegadaian mempunyai hak untuk menerima kembali secara utuh terhadap barang yang diserahkan (piutang).

Mengenai pelunasan, pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Namun, pada saat jatuh tempo pembayaran habis, dan nasabah tidak bisa menebus barang (*wanprestasi*) yang digadaikan atau tidak memperpanjang batas waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian, akan dilakukan pelelangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan tersebut berlaku bagi masyarakat umum yang sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat tentang adanya pelelangan.

Pola penyelesaian eksekusi *Marhun* (BJ) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus di Pegadaian Syariah yang sebelumnya menggunakan Pola

Penjualan (bukan lelang) berdasarkan pemahaman dan bunyi hadits: “*Janganlah menawarkan sesuatu yang sudah ditawar orang lain dan jangan meminang pinangan orang lain*” (HR, Bukhari dan Muslim). Ternyata masih membuka celah kontroversi, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) maka pola tersebut harus diganti dengan pola Lelang Syariah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5:

Apabila telah jatuh tempo, *Murtahin* (Pegadaian Syariah) harus mempepragakan *Rahin* (nasabah untuk segera melunasinya).

1. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
2. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan-*pen*) yang belum dibayar serta biaya penjualan (Bea Lelang Pembeli, Bea Lelang penjual dan Dana Sosial).
3. Kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI. No 337/KMK.Ol.2000 Bab I Pasal I, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lelang adalah *penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.*

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di Pegadaian Konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual.

Disamping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun).

Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syariah. dan selanjutnya dijadikan pola lelang di Pegadaian Syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat lelang. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktek penjualan saham di bursa efek, yakni penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan, tetapi jika tidak ada pembeli penjual yang dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.

Pada prinsipnya, Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.²³ Praktek lelang (*Muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dan kalangan Anshar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: "Apakah di rumahmu ada suatu barang?" Sahabat tadi menjawab bahwa Ia memiliki sebuah *hiis* (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu Beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkannya: "Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?" Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu Dirham. Maka Beliau mulai meningkatkan penawarannya: "Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu Dirham?" lalu berkatalah penawar lain: "Saya membelinya dengan harga dua Dirham" Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua Dirham hasil lelang kepada sahabat Anshar tadi (HR Abu Daud, Nasa'i dan Ibn Majah).

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya Ijma' (kesepakatan/*consensus of opinion*) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khathab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.²⁴ Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i, dan A1-Auza'i.

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktek lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*)
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dan penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktek lelang dikategorikan para ulama dalam praktek *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR, Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

KESIMPULAN

Pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan dan proses yang rumit. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Gadai syariah mempunyai fungsi sosial (disamping punya unsur bisnis) yang sangat besar terhadap kemaslahatan umat sesuai konsep *ta'awun* dalam Islam. Akan tetapi perlu melakukan kajian ulang kembali terhadap semua transaksi dan praktek pegadaian yang berlangsung di pegadaian syariah, karena dalam praktek dan operasionalisainya pegadaian syariah lebih banyak bermain pada wilayah perokomioan yang berorientasi profits. Sedikit sekali berorientasi pada wilayah sosial. Pada hal filosofi dasar dan pegadaian (*rahn*) itu pada awalnya adalah akad *tabarru'* bukana akad *tijarah*.

Logika yang diangkat ketika menaklukkan pergeseran dari orientasi dasar *rahn* sebagai akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* oleh karena kebutuhan untuk menghadirkan sebuah lembaga keuangan mikro yang bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat. Kalau pegadaian syariah masih bertahan dengan konsep *rahn* seperti yang terdapat dalam skema dan wacana fiqh klasik yaitu, dengan hanya mengendapkan pada aspek sosial *an sich*, maka hampir mustahil lembaga ini bisa eksis karena harus menanggung biaya operasional yang cukup

tinggi. Maka untuk itu karenanya diperlukan menciptakan sebuah skema baru pegadaian yang disamping mengusung aspek *tabarru'* juga menjalankan aspek akad *tijarah* yang berorientasi profit. Akan ada yang terlupakan oleh sementara kalangan ketika merubah orientasi gadai menjadi lembaga yang berorientasi profit, yaitu bahwa konsep dasar dan nilai filosofi awalnya adalah dalam konteks "hutang" dimana ketika seseorang berada dalam kesulitan dana.

Pergeseran orientasi dasar makna hakekat gadai tersebut terlihat dengan membagi akad-akad dalam lembaga pegadaian syariah kepada akad *mudharabah*, *Urah*, *musyarakah*, *ba'i al-muqayyadah*. Pada hal masing-masing istilah tersebut mempunyai konsep dan makna filosofi tersendiri yang kesemuanya berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan konsep, filosofi dan tujuan akad *rahn* (gadai), walaupun kemudian ada penjelasan umum yang mengatakan, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional terutama pada pengenaan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan pada pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Finally, pegadaian syariah harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang senantiasa mempromosikan nilai-nilai moralitas Islam. Identifikasi syariah tersebut yaitu mencakup aspek teknik transaksi, prosedural, pembiayaan, *pinalty* dll. []

ENDNOTES

¹ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.286

² Hasan S, *Al-Iqtishad al-Islamiy*, (Makkah Mukarramah: t.t. 1991), h.263

³ Abdurrahman Raden Aji Haqq, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions* (Univision Press: Kuala Lumpur, 1999), h.222

⁴ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamiya wa Adillatuhu*. (Beirut: Dal el-Fikr, 1997), jilid VI, h.4207-4208

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fib, 1987) cet III, .vol III, h.169, dikutip ulang oleh Muhamad Syafi'I Antonio dalam *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gemma Insani Press, 2001), h.128

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hal 29

⁷ Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not profits trasaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dan bersifat kebijakan semata, dan pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan dan

mendapatkan imbalan apapun kepada pihak lain.

⁸ Ibid. hal. 29, lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dal e-Fikr, 1997) Juz VI, h.4208.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4, terj. *Economic Doctrins of Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), hal. 197

¹⁰ Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), h.200

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006). H.314

¹² Terdapat perbedaan ulama fiqh dalam menetapkan rukun pelaksanaan akad *rahn* tersebut. Menurut jumbuh ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu *shigat* (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (*al-rabin* dan *al-murtabin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Ulama mashab Hanafi berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan penyerahan barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima agunan tersebut). Di samping itu menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh kreditor. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama mazahab Hanafi termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya., Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz VI, h.4210-421 1

¹³ DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Interamasa, 2002), h.155

¹⁴ Barang yang diterima dan calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dan barang tersebut. Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

¹⁵ Kriteria petugas penaksir: (1) memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah. (2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak. (3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

¹⁶ Kata akad berasal dan bahasa Arab *al-'uqud* yang berarti ikatan atau "simpul tali". Pengertian akad secara terminologi hukum fiqh adalah: "Perikatan antara ijab(penawaran) dengan qabul (penerimaan) secara yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam), yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Pengertian akad tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan hukum Islam, Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Persuransian Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), Cet ke-3, h.11

¹⁷ Latifa. M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*, ((Jakarta: Serambi, 2005), h.90

¹⁸ Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensi-

nya *mudhrabah* merupakan perjanjian PLS dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah sesuatu bagian tertentu dan keuntungan/kerugian proyek yang telah dibiayai.

¹⁹ Syafi'i Antonio, *op.cit.*h.95

²⁰ Heri Sudarsono. *op.cit.*, h.164

²¹ *Ibid*, lihat juga Muhammad Firdaus, dalam *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005 h.30

²² Fikih Mu'amalah Islam membedakan antara *wa'ad* (perjanjian) dengan *akad*. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak Lainnya, sedangkan akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak saja, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad *terms and condition*nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, Bila salah satu antara kedua pihak yang terikat dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/ mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati, baca. Adiwarmanto Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h.65

²³ Ibn Juzzi, *Qawanin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dal al-Fikr, 1986). H.290

²⁴ Ibn Qudamah. *Al-Mugna*. (Beirut: Dal al-Fikri, 1982), Juz VI, h.307, lihat juga Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), juz IX, h.468

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Algaud, Latifa. M. *Perbankan Syariah. Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta. Serambi. 2005
- An-Nabhani. Taqiyuddin, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti.2002
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta. Gema Insani Press. 2001
- Arifm, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta. Alvabet, 2003
- Dewi. Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006. Cet ke-3
- DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta. PT. Interamas, 2002
- Firdaus, Muhammad, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta. Renaisan, 2005
- Haqq, Abdurrahman Raden Aji, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, Univision Press: Kuala Lumpur. 1999.

- Harun. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan S., *Al-Iqtishad al-Islamiy*, Makkah: Mukarramah. 1991
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Juz IX
- Juzzi, Ibn, *Qawanin al-Fiqhiyyah*, Beirut. Dal al-Fikr, 1986
- Karim. Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: ITT Indonesia, 2003
- Nazir. Habib, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004
- Qudamah, Ibn, *Al-Mugna*, Beirut: Dal al-Fikri, 1982, Juz VI
- Rabman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4*, terj. *Economic Docfrms of Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Rayner. S. E., *The Theory of Contracts in Islamic Law. A Comparative Analysis With Particular Reference To The Modern Legislation In Kuwait, Bahrain and The United Arab Emirates*, London: Graham and Trotman. 1991
- Rusyd, Ibn, *Bidayat al-Mujtahid*, Mesir: Muassasah al-Risalah. 1982.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Sudarsono. Hen, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Vogel. Frank B., *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*, London: Kiuwer Law International, 1998
- Zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar el-Fikr, 1997), Juz VI